

KERTAS KERJA

Analisa Hasil Perumusan Tujuan dan Sasaran

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

A. Analisis Keselarasan Tujuan dengan Dokumen Perencanaan di Atasnya

Berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, tujuan yang ditetapkan yaitu:

"Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan terwujudnya tata kelola pertanahan."

Tujuan tersebut telah selaras dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, khususnya pada aspek:

- mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim;
- meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Dengan demikian, tujuan perangkat daerah telah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah (goal cascading) sehingga terdapat hubungan logis antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, hingga Perjanjian Kinerja tahunan.

B. Analisis Orientasi Outcome Tujuan

Tujuan yang dirumuskan telah berorientasi pada **hasil (outcome)**, bukan aktivitas.

Hal tersebut dibuktikan dengan indikator tujuan berupa:

Indikator	Analisis Outcome
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Mengukur kondisi kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan sebagai dampak dari berbagai program pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, persampahan, konservasi, dan perubahan iklim.
Indeks Administrasi Pertanahan	Mengukur kualitas tata kelola administrasi pertanahan, bukan jumlah pelayanan yang diberikan.

Kedua indikator tersebut menggambarkan perubahan kondisi yang diterima masyarakat sehingga memenuhi prinsip outcome.

C. Analisis Sasaran 1

Sasaran

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

Keselarasan

Sasaran ini merupakan penjabaran langsung dari tujuan "Meningkatnya pengelolaan lingkungan" sehingga hubungan sebab-akibat telah jelas.

Program yang mendukung sasaran ini antara lain:

- Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- Pengendalian Perubahan Iklim;
- Pengelolaan Sampah;
- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Analisis Outcome

Indikator yang digunakan:

- Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif;
- Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan.

Kedua indikator tersebut telah menggambarkan perubahan kondisi lingkungan akibat pelaksanaan kebijakan mitigasi perubahan iklim sehingga bukan sekadar mengukur jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Target tahunan menunjukkan adanya peningkatan secara bertahap sehingga mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

D. Analisis Sasaran 2

Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan.

Keselarasan

Sasaran ini mendukung tujuan "Terwujudnya tata kelola pertanahan" dan selaras dengan arah kebijakan reformasi birokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Analisis Outcome

Indikator:

Indeks Administrasi Pertanahan

Indikator tersebut telah menggambarkan kualitas pelayanan administrasi pertanahan secara menyeluruh, bukan hanya jumlah dokumen atau pelayanan yang diselesaikan.

Peningkatan nilai indeks menunjukkan meningkatnya efektivitas tata kelola pelayanan kepada masyarakat.

E. Analisis Sasaran 3

Sasaran

Terlaksananya Tata Kelola Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

Keselarasan

Sasaran ini mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel serta mendukung Reformasi Birokrasi.

Analisis Outcome

Indikator:

Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah

Walaupun indikator masih berupa persentase layanan internal, indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan layanan pendukung organisasi sehingga berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan tugas perangkat daerah.

Namun demikian, apabila dilakukan penyempurnaan pada periode berikutnya, indikator dapat diarahkan menjadi indikator yang lebih berorientasi pada hasil organisasi, misalnya:

- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
- Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
- Indeks Kepuasan Internal terhadap layanan kesekretariatan.

Dengan demikian orientasi outcome akan menjadi lebih kuat.